

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena global yang sangat memprihatinkan. Di era globalisasi seperti sekarang pun, kemiskinan ini tetap menjadi beban yang harus diurus pemerintah. Secara umum, kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi sandang, pangan, dan papan, termasuk juga kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan juga dapat dijadikan sebagai faktor penentu keberhasilan suatu negara dalam mensejahterahkan rakyatnya. Pada dasarnya masyarakat yang termasuk kedalam kategori miskin memiliki kelemahan dalam mencukupi kebutuhan hidup serta kemampuan berusaha dan terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya pencapaian tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang - undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang - undang dasar republik Indonesia 1945 yang mengamanatkan mengenai kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pemerintah serta pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan dari pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara miskin dan yang tidak mampu.

Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 25 ikut menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, dimana salah satu poinnya adalah pemerintah harus bertanggung jawab dengan merumuskan kebijakan dan program-program

mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pasal 15 Undang - undang tersebut juga dijelaskan mengenai bantuan-bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, Al-fitrah (2021).

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu jenis sistem yang diperlukan oleh perusahaan dalam menangani kegiatan operasional sehari-hari untuk menghasilkan informasi-informasi akuntansi yang diperlukan oleh sekolah dan pihak-pihak yang terkait lainnya sehubungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan lainnya, Rifqiansyah (2023). Penyaluran bantuan sosial hanya dapat dilakukan dengan dukungan sistem informasi dan sistem pengelolaan data yang baik dalam menjalankan proses pendataan, pemutakhiran, validasi yang harus sesuai dengan kondisi nyata agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran (Retnaningsih,2021). SIA yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap kontrol dan transparansi penyaluran dana jika informasi yang disampaikan dapat mudah dimengerti.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud dinas Sosial mempunyai fungsi, Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial, Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial, Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial, Pembinaan unit pelaksana teknis dinas sosial dan Pelaksanaan tugas lainnya di berikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsi, (<https://bengkaliskab.go.id/perangkat-daerah/dinas-sosial>)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Trans-

fers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia.

Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan Center Of Excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (Gini Ratio) seraya meningkatkan indeks pembangunan manusia (<https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>).

Adapun pelaksana dari PKH sebagai program nasional adalah kementerian Sosial yang bersinergi dengan kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Informasi dan komunikasi. Kemudian di tingkat provinsi ada Unit pengendali Program Keluarga Harapan (UPPKH) Provinsi di bawah tanggung jawab dinas Sosial provinsi, sedangkan tingkat kabupaten/Kota ada UPPKH kabupaten/kota Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K 2012).

Sistem Informasi Akuntansi dalam penyaluran dana PKH pihak dinas sosial melakukan proses verifikasi data penerima PKH itu dilakukan oleh pemerintah desa yang dilakukan melalui MUSDES (musyawarah Desa), bagi yang memiliki kategori PKH dan status ekonomi miskin atau tidak mampu maka layak untuk mendapatkan PKH.

Dalam pelaksanaannya di tingkat daerah kabupaten/kota program PKH dilaksanakan oleh dinas sosial di daerah dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) untuk mendampingi keluarga miskin penerima PKH agar pelaksanaan PKH tepat sasaran dan dapat pemanfaatan baik di tingkat kabupaten kota, kecamatan dan desa. (Pedoman Umum PKH, 2021). Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan yaitu perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan keluarga penerima manfaat PKH, penyaluran Bantuan Sosial PKH, pendampingan PKH, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH, pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH, dan transformasi kepersertaan PKH (Peraturan menteri sosial tentang program keluarga harapan).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi penyaluran dana bantuan sosial PKH di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis?
2. Apa hambatan terhadap sistem informasi akuntansi dalam penyaluran dana bantuan sosial PKH di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis?
3. Apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani hambatan tersebut?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan hanya pada Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 2023 – 2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui hambatan terhadap sistem informasi akuntansi dalam penyaluran dana bantuan sosial PKH.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani hambatan tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dan di jadikan acuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem informasi akuntansi penyaluran dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bengkalis

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini di harapkan menjadi tambahan wawasan dan menjadi sumber referensi untuk pengembangan penelitian selajutnya terutama yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi penyaluran dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaaten Bengkalis

3. Bagi Dinas Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan guna untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial dengan menggunakan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada dinas sosial kabupaten Bengkalis.

1.6 Sistemmatika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian, dapat dilihat sistematika dalam penelitian yang dilakukan ini terbagi kedalam 5 bab:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini peneliti membahas atau menjelaskan latar belakang, rumusan masalah yang mendasari kenapa penelitian ini dilakukan, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini.

BAB 2 : TINJAUAN PUSKATA

Pada bab 2 ini peneliti menjelaskan tentang teoritik yang berkaitan dengan pemahaman atau interpretasi terhadap penyaluran Bantuan Sosial program Keluarga Harapan pada dinas sosial Kabupaten Bengkalis.

BAB 3 : METODELOGI PENELITIAN

Pada bab 3 penulis menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan gambaran umum mengenai Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penelitian yang telah dilakukan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN